PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEDALUWARSA PRODUK PANGAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999

Maharaja Arut Lamandau¹, Nezmy Ariadi Danti², Asmak UI Hosnah³
lamandaure@gmail.com¹, nezmyhappy@gmail.com², asmakulhosnah@gmail.com³
Universitas Pakuan

Abstrak: Perlindungan hukum bagi konsumen adalah aspek fundamental dalam menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat dalam menggunakan produk pangan. Ketidakamanan pangan, termasuk produk yang telah melewati masa kedaluwarsa, dapat mengakibatkan dampak buruk bagi konsumen, seperti keracunan makanan atau penyakit kronis. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur secara jelas mengenai hak-hak konsumen, termasuk perlindungan dari peredaran produk pangan kedaluwarsa yang berpotensi merugikan kesehatan. Penelitian ini menyelidiki berbagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPK serta peraturan terkait lainnya terhadap konsumen akibat kedaluwarsa produk pangan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, seperti UUPK dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta beberapa kasus nyata mengenai peredaran produk pangan kedaluwarsa di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UUPK dan peraturan-peraturan terkait lainnya telah memberikan perlindungan yang cukup bagi konsumen, implementasinya masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya kasus peredaran produk pangan kedaluwarsa di pasaran, lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, serta rendahnya kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka. Untuk itu, diperlukan peningkatan pengawasan dari pemerintah, penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku usaha yang melanggar, serta edukasi yang lebih intensif kepada konsumen. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen dapat ditingkatkan, sehingga hak-hak konsumen dapat lebih terjamin dan keamanan pangan di Indonesia dapat tercapai secara menyeluruh.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Produk Pangan Perlindungan Hukum, Kadaluarsa, Undang Undang Konsumen.

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, dan konsumsi produk pangan yang aman serta sehat adalah hak mendasar setiap konsumen, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia. Produk pangan yang kedaluwarsa menjadi sumber potensial masalah kesehatan, termasuk keracunan makanan, infeksi, dan berbagai penyakit kronis lainnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran produk pangan kedaluwarsa merupakan aspek krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius. Meskipun UUPK telah menetapkan kerangka kerja perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang tidak layak konsumsi, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Pengawasan terhadap peredaran produk pangan seringkali kurang efektif, dan pengetahuan konsumen mengenai hak-hak mereka juga masih terbatas. Studi ini mengeksplorasi lebih dalam tentang perlindungan hukum yang diatur dalam UUPK serta menganalisis sejauh mana undang-undang tersebut dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi konsumen.

Dalam konteks ini, akan dianalisis berbagai ketentuan yang terkandung dalam UUPK yang secara khusus mengatur mengenai produk pangan, termasuk prosedur penarikan produk dari peredaran, kewajiban produsen untuk memastikan kualitas produk, serta hak-hak konsumen dalam menghadapi produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan. Selain itu, akan dibahas juga tantangan-tantangan konkret dalam implementasi undang-undang tersebut, seperti kendala-kendala dalam sistem pengawasan, keterbatasan sumber daya, dan peran serta aktif dari semua pihak terkait termasuk pemerintah, produsen, dan masyarakat umum. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang keefektifan perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk pangan, serta menyediakan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan sistem yang sudah ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terpenuhi dengan baik dan masyarakat dapat mengakses produk makanan sehat dan berkualitas, sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif, yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode yuridis normatif ini bertujuan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang berlaku serta mengkaji penerapannya dalam kehidupan nyata. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan memahami regulasi yang mengatur tentang perlindungan konsumen, khususnya yang berhubungan dengan produk pangan. Regulasi tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta peraturan-peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait. Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis beberapa kasus nyata yang terjadi di Indonesia terkait peredaran produk pangan kedaluwarsa, yang kemudian dijadikan contoh untuk mengidentifikasi masalah-masalah dalam implementasi hukum serta untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen. Dengan mempelajari kasus-kasus ini, peneliti dapat mengeksplorasi sejauh mana ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah diimplementasikan dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan mencakup berbagai peraturan perundang-undangan seperti UUPK dan Undang-Undang Pangan² beserta regulasi turunannya. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder, yang meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lain yang membahas mengenai perlindungan konsumen dan keamanan produk pangan. Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk memberikan perspektif tambahan dan mendukung

analisis yang dilakukan. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perlindungan hukum bagi konsumen, terutama dalam kasus peredaran produk pangan kedaluwarsa. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil analisis diharapkan mampu menjelaskan fenomena yang ada secara mendalam serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait permasalahan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebenarnya telah memberikan perlindungan yang cukup komprehensif bagi konsumen terkait produk pangan kedaluwarsa. Pasal 4 UUPK menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Ketentuan ini secara eksplisit menegaskan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan produk pangan yang aman dan layak konsumsi. Selain itu, Pasal 7 UUPK juga mengatur Pelaku usaha diharuskan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan akurat tentang kondisi serta jaminan barang yang diperjualbelikan, termasuk masa kedaluwarsa produk makanan. Tujuannya adalah agar pelanggan dapat mengetahui dengan jelas kualitas barang yang akan dikonsumsi dan terhindar dari produk yang berpotensi membahayakan kesehatan.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat banyak kasus peredaran produk pangan kedaluwarsa di pasaran, yang menunjukkan adanya masalah dalam implementasi perlindungan konsumen tersebut. Pengawasan terhadap peredaran produk pangan kedaluwarsa belum berjalan secara optimal. Beberapa pelaku usaha masih terbukti menjual produk pangan yang telah melewati masa kedaluwarsa, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan jaminan keamanan bagi konsumen.

Lebih lanjut, penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan juga dinilai kurang efektif. Dalam sejumlah kasus, pelaku usaha yang terbukti mengedarkan produk pangan kedaluwarsa hanya dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau denda ringan, yang tidak memberikan efek jera yang signifikan. Sanksi yang diberikan seringkali tidak sebanding dengan potensi bahaya yang dihadapi konsumen, sehingga masih ada celah bagi pelaku usaha untuk mengulangi pelanggaran serupa. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun UUPK telah memberikan perlindungan yang cukup bagi konsumen dari segi regulasi, penerapannya masih perlu diperkuat. Pengawasan yang lebih ketat serta sanksi yang lebih tegas diperlukan agar perlindungan hukum terhadap konsumen dapat terlaksana secara efektif, terutama dalam mencegah peredaran produk pangan kedaluwarsa yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Pembahasan

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengonsumsi produk pangan merupakan hal yang sangat penting, terutama ketika menyangkut produk yang telah kedaluwarsa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara tegas mengatur hak-hak konsumen untuk memperoleh produk yang aman, layak konsumsi, dan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat banyak produk pangan kedaluwarsa yang beredar di pasaran, sehingga menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Untuk itu, pembahasan ini akan menguraikan lebih dalam mengenai permasalahan perlindungan hukum bagi konsumen, faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran produk pangan kedaluwarsa, serta solusi yang dapat diterapkan guna memperkuat perlindungan hukum konsumen.

1. Hak Konsumen Menurut UUPK dan Implementasinya

UUPK menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Ini berarti setiap konsumen berhak untuk mendapatkan produk yang tidak hanya layak konsumsi tetapi juga memenuhi standar kualitas dan

keamanan yang telah ditetapkan. Selain itu, Pasal 7 UUPK mengatur Pelaku usaha diharuskan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan akurat tentang kondisi serta jaminan barang yang diperjualbelikan, termasuk masa kedaluwarsa produk pangan. Ketentuan ini mengharuskan pelaku usaha untuk mencantumkan informasi mengenai tanggal produksi dan kedaluwarsa secara jelas pada kemasan produk pangan agar konsumen dapat mengetahui kondisi produk yang dibeli. Namun, meskipun regulasi ini telah ditetapkan, kenyataannya implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Pengawasan terhadap peredaran produk pangan, terutama di daerah-daerah terpencil, masih lemah. Produk pangan yang telah kedaluwarsa masih sering ditemukan dijual di pasaran tanpa adanya tindakan yang tegas dari pihak berwenang. Lemahnya pengawasan ini tidak hanya mencerminkan kurangnya koordinasi antar instansi terkait, tetapi juga menunjukkan adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengedarkan produk yang tidak layak konsumsi.

2. Faktor Penyebab Peredaran Produk Pangan Kedaluwarsa

Beberapa faktor penyebab masih maraknya peredaran produk pangan kedaluwarsa di pasaran antara lain:

a. Lemahnya Pengawasan Pemerintah:

Pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan, seringkali tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Terutama di daerah terpencil, produk pangan kedaluwarsa masih mudah ditemukan karena minimnya pengawasan. Selain itu, frekuensi inspeksi yang tidak teratur membuat pelaku usaha merasa leluasa untuk menjual produk yang telah melewati masa kedaluwarsa tanpa takut terkena sanksi yang berat.

b. Kurangnya Kesadaran Konsumen:

Banyak konsumen yang belum memahami risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh produk pangan kedaluwarsa. Ketidaktahuan ini seringkali dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk tetap memasarkan produk yang telah melewati masa kedaluwarsanya. Edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya produk kedaluwarsa juga masih minim, sehingga konsumen sering tidak teliti dalam memeriksa masa kedaluwarsa pada kemasan produk sebelum membelinya.

c. Ketidapatuhan Pelaku Usaha terhadap Regulasi:

Beberapa pelaku usaha masih mengabaikan kewajiban mereka untuk memberikan informasi yang jelas tentang masa kedaluwarsa produk. Ini sering terjadi karena mereka ingin menghindari kerugian akibat harus menarik produk yang sudah kedaluwarsa dari pasaran. Selain itu, sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini seringkali hanya berupa denda administratif yang tidak memberikan efek jera.

3. Peran Pemerintah dalam Pengawasan Produk Pangan Kedaluwarsa

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa produk pangan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Untuk itu, perlu dilakukan beberapa langkah konkret guna memperketat pengawasan terhadap produk pangan, antara lain:

a. Peningkatan Kapasitas Pengawasan:

Pemerintah, melalui instansi terkait seperti BPOM dan Dinas Kesehatan, perlu meningkatkan kapasitas pengawasan, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Peningkatan kapasitas ini mencakup penambahan jumlah petugas pengawas, frekuensi inspeksi yang lebih sering, serta penggunaan teknologi untuk memantau peredaran produk pangan secara lebih efektif.

b. Penegakan Hukum yang Lebih Tegas:

Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang mengedarkan produk kedaluwarsa perlu ditingkatkan agar memberikan efek jera. Sanksi tersebut dapat berupa pencabutan izin usaha, denda yang lebih besar, atau bahkan hukuman pidana jika terbukti adanya kesengajaan yang menyebabkan bahaya bagi konsumen. Penegakan hukum yang tegas akan mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam memasarkan produk pangan dan mematuhi regulasi yang berlaku.

c. Kerja Sama Antar Instansi dan Lembaga Terkait:

Sinergi antara berbagai instansi seperti BPOM, Dinas Kesehatan, dan lembaga perlindungan konsumen perlu ditingkatkan. Kerja sama yang baik antar lembaga ini akan mempermudah proses pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

4. Pemberdayaan Lembaga Perlindungan Konsumen

Lembaga-lembaga perlindungan konsumen, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), juga perlu diberdayakan agar dapat memberikan advokasi dan edukasi yang lebih efektif kepada masyarakat. Pemberdayaan ini mencakup peningkatan kapasitas lembaga dalam menangani aduan konsumen, melakukan advokasi kebijakan, serta menyelenggarakan program-program edukasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya lembaga yang kuat, konsumen akan lebih mudah mengakses informasi dan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

5. Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Konsumen

Sosialisasi dan edukasi kepada konsumen mengenai bahaya konsumsi produk pangan kedaluwarsa harus dilakukan secara masif. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye di media massa, program sosialisasi di sekolah-sekolah, serta penyuluhan langsung di pasar-pasar tradisional dan modern. Konsumen yang teredukasi dengan baik akan lebih teliti dalam memeriksa masa kedaluwarsa pada kemasan produk dan lebih sadar akan hak-hak mereka jika menemukan produk yang tidak layak konsumsi.

6. Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Regulasi Pengawasan:

Peraturan terkait pengawasan peredaran produk pangan perlu direvisi agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Pemerintah juga perlu mengembangkan regulasi yang lebih tegas untuk penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

b. Penetapan Standar Sanksi yang Lebih Berat:

Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang mengedarkan produk kedaluwarsa harus sebanding dengan bahaya yang ditimbulkan. Sanksi tersebut dapat berupa denda yang lebih besar, pencabutan izin usaha, hingga hukuman pidana jika terbukti adanya pelanggaran berat.

c. Penguatan Sinergi Antar Lembaga:

Sinergi antar lembaga pengawasan, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan konsumen perlu diperkuat agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Keterlibatan aktif dari semua pihak ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk pangan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang ditetapkan.

d. Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan:

Penggunaan teknologi seperti aplikasi pelaporan konsumen atau sistem monitoring berbasis digital dapat mempermudah pengawasan peredaran produk pangan di pasaran. Teknologi ini juga dapat digunakan oleh konsumen untuk melaporkan temuan produk kedaluwarsa secara cepat dan efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum bagi pembeli produk pangan kedaluwarsa dapat ditingkatkan sehingga konsumen dapat merasa aman dan terlindungi dalam mengonsumsi produk pangan yang tersedia di pasaran.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pembeli di Indonesia terhadap makanan kedaluwarsa merupakan isu penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta berbagai peraturan lainnya. Namun, meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas, implementasinya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus peredaran produk pangan kedaluwarsa di pasaran, yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan

konsumen. Berdasarkan data yang ada, kasus peredaran produk pangan kedaluwarsa menunjukkan adanya kelemahan dalam Pemeriksaan dan penegakan hukum. Pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih terbatas, seringkali tidak mencakup seluruh produk yang beredar di pasar. Selain itu, sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran sering kali tidak cukup tegas, sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, pengawasan terhadap peredaran produk pangan harus ditingkatkan secara signifikan. Ini mencakup pemantauan rutin di pasar dan toko, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengawasan tersebut. Kedua, penerapan sanksi yang lebih tegas dan proporsional harus diterapkan bagi pelaku usaha yang melanggar aturan. Sanksi ini bisa berupa denda yang lebih besar, pencabutan izin usaha, atau hukuman pidana untuk pelanggaran yang mengancam kesehatan masyarakat. Selain itu, edukasi kepada konsumen mengenai hak-hak mereka juga sangat penting. Konsumen perlu memahami cara mengecek tanggal kedaluwarsa dan mengenali produk yang aman untuk dikonsumsi. Program sosialisasi yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga konsumen dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. Terakhir, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga konsumen harus diperkuat untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang aman dan sehat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peredaran produk pangan kedaluwarsa dapat diminimalisasi, sehingga perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmak UI Hosnah.(2024). PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DALAM KASUS KEBOCORAN DATA BANK SYARIAH INDONESIA (2020). 2 (1): 156–165.
- Budiarto, I. (2019). "Hukum Pangan dan Perlindungan Konsumen: Kajian Terhadap Produk Kedaluwarsa." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 22(4), 200-215.
- Firmansyah, A. (2021). "Edukasi Konsumen dalam Menghadapi Produk Pangan Kedaluwarsa." *Jurnal Pendidikan dan Konsumen*, 3(3), 150-165.
- Hidayati, R. (2019). "Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa." *Jurnal Hukum, Ekonomi, dan Bisnis*, 11(1), 75-90.
- Kusuma, P. A. (2022). "Penerapan Sanksi Hukum bagi Pelanggaran Terkait Produk Pangan Kedaluwarsa." *Jurnal Penelitian Hukum*, 30(1), 92-106.
- Nurlita, N. (2022). "Kolaborasi Antara Pemerintah dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 15(1), 80-95.
- Prasetyo, A. S. (2020). "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 123-138.
- Putra, A. A. (2019). *Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Produk Pangan di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(1), 45-60
- Salim, M. (2020). "Dampak Konsumsi Produk Pangan Kedaluwarsa terhadap Kesehatan Masyarakat: Tinjauan Hukum." *Jurnal Kesehatan dan Hukum*, 14(2), 55-70.
- Sari, D. P. (2018). "Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk Pangan yang Kedaluwarsa: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum*, 24(1), 45-60.
- Siregar, D. R. (2018). *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha dalam Menjamin Kualitas Produk Pangan*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 98-110.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Utami, S. (2021). "Analisis Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Produk Pangan Kedaluwarsa di Pasar." *Jurnal Perdagangan dan Hukum*, 8(2), 213-229.
- Wahyuni, R. S. (2020). Implementasi Sanksi Terhadap Pelaku Usaha yang Mengedarkan Produk Pangan Kedaluwarsa. *Jurnal Hukum Perlindungan Konsumen*, 7(3), 155-167.

Wahyuni, T. (2019). "Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan." *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 37-50.